

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN INFLASI SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

The Effect of Local Own-Source Revenue and Transfer Revenue on Regional Expenditure with Inflation as a Control Variable in Provincial Governments in Indonesia

Anitha Wastini Sanak^{1,a)}, Yohana Febiani Angi^{2,b)}, Maria Immaculata Bahantwelu^{3,c)}
^{1,2,3}) Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Koresponden : ^{a)} sanakanitha@gmail.com, ^{b)} yohana.angi@staf.undana.ac.id,
^{c)} maria.bahantwelu@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah dengan Inflasi sebagai variabel kontrol pada pemerintah 5 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Papua selama periode 2019–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode regresi data panel yang diolah menggunakan EViews. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah provinsi dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dimana Pendapatan Transfer memiliki pengaruh yang lebih dominan sehingga mengindikasikan adanya fenomena *flypaper effect*, sedangkan Inflasi tidak berpengaruh. Secara simultan, seluruh variabel berpengaruh dengan kemampuan penjelasan model sebesar 97,8%.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Inflasi, Belanja Daerah, Data Panel

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah oleh pemerintah daerah (Mukhtar, 2022). Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah yang mengakibatkan penurunan ekuitas dalam satu tahun anggaran dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Pramono, 2021).

Pendapatan daerah pada dasarnya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Nasir, 2023). Sementara itu, Pendapatan Transfer berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal antar daerah (Halimah et al., 2024). Namun, tingginya proporsi Pendapatan Transfer dibandingkan PAD menunjukkan masih adanya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Bassang et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan lima provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Pemilihan kelima provinsi tersebut didasarkan pada karakteristik fiskal dan ekonomi yang berbeda. DKI Jakarta dipilih karena memiliki PAD tertinggi di Indonesia. Jawa Timur dipilih karena jumlah penduduk besar dan tingkat Belanja Daerah yang tinggi. Jawa Barat dipilih karena tingkat pembangunan dan aktivitas industri yang tinggi. Kalimantan Timur dipilih karena struktur pendapatan daerahnya dipengaruhi oleh sektor sumber daya alam. Papua dipilih karena menerima dana transfer dan dana otonomi khusus yang relatif besar.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran pada lima provinsi tersebut selama periode 2019–2025, terlihat adanya fluktuasi pada PAD, Pendapatan Transfer, Belanja Daerah, serta selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi makroekonomi, inflasi pada lima provinsi tersebut menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan beberapa lonjakan pada periode tertentu.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PAD dan Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Belanja Daerah (Apriliani, 2023; Solicha & Hanifa, 2024). Penelitian Utami & Iskandar (2020) dan Apriliani (2023) juga menemukan adanya fenomena *flypaper effect*. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum memasukkan inflasi sebagai variabel kontrol secara bersamaan dalam model analisis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut.

KAJIAN TEORI

Teori *Flypaper Effect*

Teori *flypaper effect* menjelaskan fenomena di mana belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sagoe & Tingum, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mudah membelanjakan dana yang berasal dari pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD yang dikumpulkan sendiri (Iqbal et al., 2023). Teori ini relevan untuk menganalisis apakah kelima provinsi menunjukkan adanya *flypaper effect*.

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan publik lebih efisien. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal (Dewi & Oktafia, 2026). Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Teori Pengeluaran Pemerintah

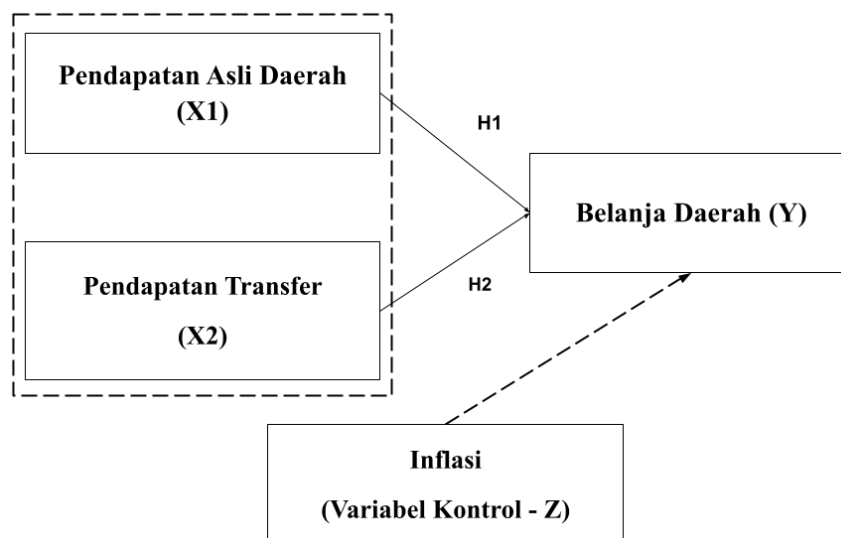
Teori pengeluaran pemerintah berkaitan dengan penggunaan sumber daya negara untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Yulianti & Daud, 2021). Efektivitas pengeluaran pemerintah juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi alokasi anggaran (Abdullah, 2025).

Teori Inflasi

Teori inflasi menjelaskan fenomena naiknya harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian (Aryansyah et al., 2025). Dalam konteks Belanja Daerah, inflasi dapat membuat biaya proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa meningkat, sehingga realisasi Belanja Daerah seringkali tidak sesuai dengan rencana awal.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan hubungan antar variabel. PAD (X_1) dan Pendapatan Transfer (X_2) sebagai variabel independen memengaruhi Belanja Daerah (Y). Inflasi (Z) ditempatkan sebagai variabel kontrol yang memengaruhi Y secara tidak langsung, berfungsi untuk mengendalikan pengaruh faktor eksternal. Pengujian dilakukan secara parsial dan simultan.



Gambar 1.
Kerangka Berpikir

Keterangan :

- Secara Parsial
----- Secara Simultan

Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia
H2 : Pendapatan Transfer berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah provinsi di Indonesia.
H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan Inflasi sebagai variabel kontrol pada pemerintah provinsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan regresi data panel (EViews) (Ghozali, 2017). Data sekunder diperoleh dari LRA pemerintah provinsi dan BPS periode 2019–2025. Populasi adalah seluruh data keuangan 5 provinsi. Sampel diambil dengan teknik jenuh (sensus) berdasarkan kriteria tertentu, menghasilkan 35 observasi (5 provinsi $\times$ 7 tahun). Variabel penelitian: PAD (X_1) dan Pendapatan Transfer (X_2) sebagai independen, Belanja Daerah (Y) sebagai dependen, Inflasi (Z) sebagai variabel kontrol (Indrasari, 2020). Berikut adalah tabel operasionalisasi variabel penelitian yang digunakan:

Tabel 1.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	PAD adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (DJPK, 2025)	Total realisasi PAD yang terdiri dari: 1. Pajak Daerah. 2. Retribusi Daerah. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 4. Lain-lain PAD yang sah	Rasio
Pendapatan Transfer (X_2)	Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah	Total realisasi Pendapatan Transfer yang terdiri dari: 1. Dana Alokasi Umum. 2. Dana Alokasi Khusus. 3. Dana Bagi Hasil	Rasio
Belanja Daerah (Y)	Belanja Daerah adalah seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 160	Total realisasi Belanja Daerah yang terdiri dari: 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga. 4. Belanja Transfer.	Rasio

Inflasi (Variabel Kontrol) (Z)	Inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu yang memengaruhi daya beli dan biaya belanja pemerintah. (BPS, 2025)	Tingkat inflasi tahunan (%) berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK)	Rasio
--------------------------------------	--	---	-------

Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model data panel (Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), analisis regresi data panel, uji hipotesis (uji t dan uji F), serta koefisien determinasi (R^2).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, periode penelitian yang singkat (2019–2025) dan hanya lima provinsi, sehingga generalisasi terbatas. Kedua, variabel independen hanya PAD dan Pendapatan Transfer, padahal faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, atau kebijakan fiskal pusat juga berpengaruh. Ketiga, penggunaan data sekunder bergantung pada akurasi dan konsistensi data yang tersedia. Keempat, inflasi diukur tahunan sehingga fluktuasi jangka pendek tidak tertangkap secara rinci. Kelima, model regresi mengasumsikan hubungan linier, padahal hubungan antar variabel dapat bersifat nonlinier atau dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	X1	X2	Z	Y
Mean	2.99E+13	4.44E+13	2.562286	7.92E+13
Median	3.99E+13	4.28E+13	2.180000	6.49E+13
Maximum	5.53E+13	8.28E+13	6.520000	1.44E+14
Minimum	9.55E+11	1.07E+13	0.600000	1.30E+13
Std. Dev.	1.95E+13	2.46E+13	1.435821	4.31E+13
Skewness	-0.377137	0.108757	1.370478	0.169717
Kurtosis	1.397797	1.432771	4.220781	1.564340
Jarque-Bera	4.573310	3.650966	13.12959	3.173823
Probability	0.101606	0.161140	0.001409	0.204556
Sum	1.05E+15	1.55E+15	89.68000	2.77E+15
Sum Sq.	4.43E+28	8.96E+28	299.8796	2.83E+29
Sum Sq. Dev.	1.29E+28	2.06E+28	70.09382	6.32E+28
Observations	35	35	35	35

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) variabel PAD sebesar 29,9 triliun Pendapatan Transfer sebesar 44,4 triliun Inflasi sebesar 2,56% dan Belanja Daerah sebesar 79,2 triliun. Selain itu, seluruh variabel memiliki nilai mean yang lebih besar dibandingkan standar deviasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah atau tidak terlalu bervariasi sehingga layak digunakan dalam analisis regresi data panel.

Uji Pemilihan Model Data Panel

Uji Chow

Tabel 3.
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.809490	(4,27)	0.0453
Cross-section Chi-square	12.179715	4	0.0161

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,0161. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0161 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat digunakan berdasarkan hasil Uji Chow adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji Hausman

Tabel 4.
Hasil Uji Hausman

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.809490	(4,27)	0.0453
Cross-section Chi-square	12.179715	4	0.0161

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,1947. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,1947 > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).

Uji Lagrange Multipeler (LM)

Tabel 5.
Hasil Uji Lagrange Multipeler (LM)

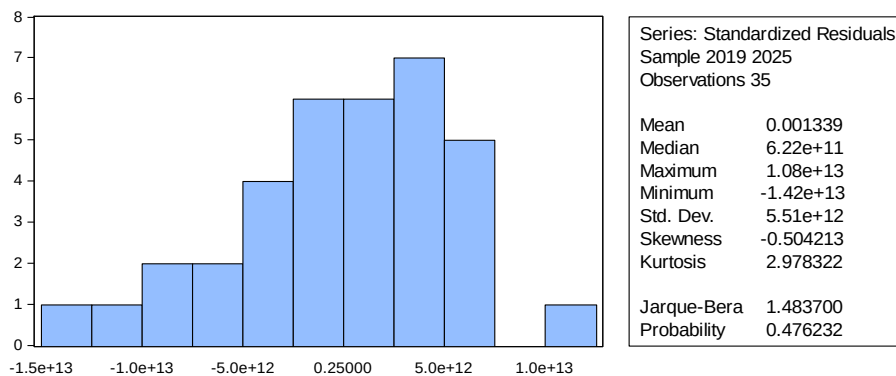
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.002911 (0.9570)	0.184309 (0.6677)	0.187221 (0.6652)
Honda	0.053957 (0.4785)	-0.429312 (0.6662)	-0.265417 (0.6047)
King-Wu	0.053957 (0.4785)	-0.429312 (0.6662)	-0.229726 (0.5908)
Standardized Honda	1.172329 (0.1205)	-0.061113 (0.5244)	-2.690025 (0.9964)
Standardized King-Wu	1.172329 (0.1205)	-0.061113 (0.5244)	-2.628048 (0.9957)
Gourieroux, et al.	--	--	0.002911 (0.7281)

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,6652. Karena nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,6652 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian adalah Common Effect Model (CEM) dibandingkan Random Effect Model (REM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2.

Hasil Uji Normalitas

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian model regresi data panel yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6.

Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	Z
X1	1.000000	0.453311	0.155730
X2	0.453311	1.000000	0.159929
Z	0.155730	0.159929	1.000000

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai korelasi kurang dari 0,90. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis regresi data panel.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.44E+12	1.54E+12	2.889383	0.0070
X1	-0.012775	0.033687	-0.379231	0.7071
X2	-0.012524	0.026686	-0.469318	0.6421
Z	3.29E+11	4.13E+11	0.796001	0.4321

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser, memperoleh nilai probabilitas masing-masing variabel independen, yaitu X1 sebesar 0,6809, X2 sebesar 0,4643, dan X3 sebesar 0,5101. Seluruh nilai probabilitas variabel independen tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H0 diterima, yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 8.

Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.38E+12	2.61E+12	-2.060128	0.0479
X1	0.982736	0.057197	17.18158	0.0000
X2	1.239725	0.045310	27.36105	0.0000
Z	4.74E+10	7.01E+11	0.067643	0.9465
R-squared	0.983690	Mean dependent var	7.92E+13	
Adjusted R-squared	0.982112	S.D. dependent var	4.31E+13	
S.E. of regression	5.77E+12	Akaike info criterion	61.71110	
Sum squared resid	1.03E+27	Schwarz criterion	61.88885	
Log likelihood	-1075.944	Hannan-Quinn criter.	61.77246	
F-statistic	623.2392	Durbin-Watson stat	1.317393	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil analisis regresi data panel (Common Effect Model), diperoleh persamaan: $Y = -5,38 \times 10^{12} + 0,982736 X_1 + 1,239725 X_2 + 4,74 \times 10^{10} Z$. Koefisien PAD sebesar 0,982736 ($p < 0,05$) menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD 1 satuan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,982736 satuan. Koefisien Pendapatan Transfer sebesar 1,239725 ($p < 0,05$) lebih besar dari koefisien PAD, mengindikasikan terjadinya *flypaper effect*. Inflasi memiliki koefisien positif (Rp47,4 miliar per 1% kenaikan inflasi) namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0,9465 > 0,05$), sehingga inflasi tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 9.
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.38E+12	2.61E+12	-2.060128	0.0479
X1	0.982736	0.057197	17.18158	0.0000
X2	1.239725	0.045310	27.36105	0.0000
Z	4.74E+10	7.01E+11	0.067643	0.9465

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji t menunjukkan bahwa PAD (t-hitung 17,18158 > t-tabel 1,978239; $p = 0,0000 < 0,05$) dan Pendapatan Transfer (t-hitung 27,36105 > t-tabel 1,978239; $p = 0,0000 < 0,05$) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sehingga H1 dan H2 diterima. Sebaliknya, inflasi (t-hitung 0,067643 < t-tabel 1,978239; $p = 0,9465 > 0,05$) tidak berpengaruh signifikan, sehingga H0 diterima.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 10.
Hasil Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0.983690
Adjusted R-squared	0.982112
S.E. of regression	5.77E+12
Sum squared resid	1.03E+27
Log likelihood	-1075.944
F-statistic	623.2392
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji F memperoleh nilai F-statistic sebesar 623,2392 dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.983690
Adjusted R-squared	0.982112
S.E. of regression	5.77E+12
Sum squared resid	1.03E+27
Log likelihood	-1075.944
F-statistic	623.2392
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil koefisien determinasi memperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,977892 atau 97,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel PAD, Pendapatan Transfer, dan Inflasi mampu menjelaskan variasi Belanja Daerah sebesar 97,8%. Sementara itu, sisanya sebesar 2,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian mendukung H1: PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) dan penelitian Solicha & Hanifa (2024). PAD yang tinggi meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memungkinkan alokasi belanja lebih besar untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, koefisien PAD (0,983) lebih kecil dibanding koefisien Pendapatan Transfer (1,240), menunjukkan peran PAD belum dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah dan ketergantungan pada dana transfer tinggi. Secara kritis, temuan ini mengonfirmasi bahwa optimalisasi PAD belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena lebih mudah mengandalkan transfer pusat. Generalisasi temuan ini terbatas pada lima provinsi dengan karakteristik spesifik.

Secara lebih mendalam, pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah juga mencerminkan siklus fiskal yang sehat. Ketika daerah mampu meningkatkan PAD melalui perluasan basis pajak dan retribusi, pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan dana tambahan, tetapi juga memperoleh legitimasi fiskal yang lebih kuat dari masyarakat. Hal ini karena peningkatan PAD umumnya disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk timbal balik. Dalam konteks lima provinsi yang diteliti, DKI Jakarta menunjukkan bahwa tingginya PAD berkorelasi dengan belanja infrastruktur yang besar, sementara Papua yang PAD-nya rendah justru belanja daerahnya tetap tinggi karena ditopang transfer. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa peran PAD sangat tergantung pada struktur ekonomi daerah; provinsi dengan sektor jasa dan industri maju (Jawa) lebih mudah mengoptimalkan PAD dibandingkan provinsi berbasis SDA (Kaltim) atau wilayah timur (Papua). Oleh karena itu, kebijakan peningkatan PAD harus disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, bukan dengan pendekatan satu ukuran untuk semua.

Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian mendukung H2: Pendapatan Transfer berpengaruh positif lebih besar daripada PAD. Koefisien yang lebih besar (1,240 vs 0,983) mengindikasikan adanya fenomena *flypaper effect*, di mana belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer daripada PAD. Secara formal, *flypaper effect* dapat diuji dengan membandingkan elastisitas; dalam penelitian ini, karena koefisien transfer > koefisien PAD, dan keduanya signifikan, maka indikasi *flypaper effect* terbukti secara empiris. Hasil ini sejalan dengan Apriliani (2023) dan Solicha & Hanifa (2024). Dominasi transfer mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal daerah, yang secara kritis dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD. Implikasi kebijakan: pemerintah pusat perlu merancang transfer yang lebih mendorong peningkatan PAD, misalnya dengan skema *matching grant* atau *performance-based transfer*.

Lebih lanjut, dominasi Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah tidak hanya menunjukkan *flypaper effect*, tetapi juga mengungkapkan adanya fenomena asymmetric response dalam pengelolaan keuangan daerah. Artinya, pemerintah daerah cenderung merespons kenaikan dana transfer secara berlebihan (*over-spending*), namun ketika PAD meningkat, respons belanjanya lebih hati-hati. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori *fiscal illusion*: dana transfer dianggap sebagai "uang gratis" dari pusat sehingga pengawasannya lebih longgar, berbeda dengan PAD yang langsung dirasakan sebagai beban oleh masyarakat. Bukti empiris dari kelima provinsi menunjukkan bahwa ketergantungan transfer tertinggi terjadi di Papua (PAD hanya sekitar 2-3% dari total pendapatan), sementara DKI Jakarta yang PAD-nya tertinggi justru memiliki proporsi transfer lebih kecil (sekitar 30-40%). Kondisi ini menciptakan lingkaran setan: daerah yang sangat bergantung pada transfer kehilangan insentif untuk menggali PAD, yang pada akhirnya memperkuat ketergantungan itu sendiri. Pemutusan lingkaran ini memerlukan reformasi skema transfer, misalnya dengan menurunkan porsi transfer tak bersyarat (DAU) dan meningkatkan transfer berbasis kinerja (DAK tematik) yang mensyaratkan kontribusi PAD.

Inflasi sebagai Variabel Kontrol dalam Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah

Berbeda dengan dua variabel independen, inflasi dalam penelitian ini berperan murni sebagai variabel kontrol. Hasil uji t menunjukkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah ($p=0,9465$). Hal ini berarti bahwa perubahan tingkat inflasi selama periode penelitian (rata-rata 2,56%, stabil) tidak menyebabkan perubahan nyata pada belanja daerah. Dengan kata lain, hubungan antara PAD dan Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah tidak terpengaruh oleh fluktuasi inflasi. Inflasi hanya digunakan untuk mengontrol bias akibat perubahan harga, bukan sebagai faktor penentu utama. Hasil ini konsisten dengan penelitian Astutik et al. (2026) yang menemukan inflasi tidak berpengaruh pada belanja daerah. Secara kritis, ketidakpengaruh inflasi dapat disebabkan karena anggaran daerah sudah disusun dengan asumsi inflasi tertentu dan mekanisme penyesuaian (misalnya belanja pegawai yang sudah tetap, proyek yang dikontrak dengan harga tetap), sehingga fluktuasi inflasi tahunan tidak serta-merta mengubah realisasi belanja. Namun, perlu dicatat bahwa inflasi yang sangat tinggi (di atas 10%) mungkin akan berdampak berbeda; dalam penelitian ini inflasi tergolong rendah hingga sedang.

Di samping itu, meskipun inflasi terbukti tidak berpengaruh signifikan, perannya sebagai variabel kontrol tetaplah penting secara metodologis. Kehadiran inflasi dalam model regresi berfungsi untuk menangkap noise atau gangguan dari perubahan harga umum yang dapat memengaruhi nilai *riil* belanja daerah. Tanpa mengontrol inflasi, koefisien PAD dan Pendapatan Transfer bisa menjadi bias (*overestimate*) karena sebagian kenaikan belanja daerah secara nominal mungkin hanya akibat inflasi, bukan karena peningkatan riil kapasitas fiskal. Dalam penelitian ini, ketidakpengaruh inflasi justru memberikan keyakinan bahwa pengaruh PAD dan transfer terhadap belanja daerah adalah murni pengaruh fiskal, bukan artefak perubahan harga. Namun demikian, kelemahan pengukuran inflasi tahunan yang bersifat agregat mungkin gagal menangkap disparitas inflasi antar komponen belanja (misalnya inflasi konstruksi lebih tinggi dari inflasi umum). Penelitian mendatang dapat menggunakan inflasi sektoral (misalnya inflasi bahan bangunan, inflasi jasa kesehatan) untuk mengontrol belanja modal dan belanja operasi secara terpisah. Singkatnya, meskipun inflasi tidak signifikan, penggunaannya sebagai variabel kontrol tetap meningkatkan validitas internal model.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada 5 provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa peningkatan PAD dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai Belanja Daerah.
2. Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada 5 provinsi di Indonesia, dengan dominasi yang lebih besar mengindikasikan terjadinya fenomena *flypaper effect*.
3. Secara simultan, PAD, Pendapatan Transfer, dan Inflasi berpengaruh terhadap Belanja Daerah, namun secara parsial Inflasi tidak berpengaruh. Model penelitian memiliki kemampuan penjelasan sebesar 97,8%.

Saran

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik serta mendukung pengembangan teori desentralisasi fiskal.

Bagi objek penelitian, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan PAD agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi seperti inflasi dalam pengambilan kebijakan fiskal.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode penelitian, menambah jumlah variabel, serta menggunakan objek penelitian yang lebih luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. (2025). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pilar Keberhasilan Otonomi Daerah. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(10), 3372–3379. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i10.2964>
- Apriliani, D. (2023). Analisis *Flypaper effect*, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi

- Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 39–50.
- Aryansyah, A. F., Basri, M. H., Wardhani, R. S., Wibawa, D. P., Noviyanti, I., Sari, W. F., Safitri, B., & Waradhika, N. (2025). *Dasar-Dasar Teori Inflasi: Dari Pemikiran Klasik hingga Keynesian*. Widina.
- Astutik, I. T., Syafri, M., & Pembangunan, E. (2026). Pengaruh Suku Bunga Terhadap Nilai Tukar dengan Inflasi Sebagai Variabel Kontrol (2005–2025). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(3), 23–34.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2023 <https://www.bps.go.id>
- Bassang, I., Marchelin, & Marinus, R. (2024). Analisis Penggunaan Dana Transfer dalam Mendorong Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Toraja Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(9), 4513–4523. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.4219>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Dewi, K. T. B., & Oktafia, R. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Jombang Periode 2005–2024. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1). <https://doi.org/10.57094/jpe.v7i1.4090>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2025). Pendapatan Asli Daerah (PAD). <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Fahlev, F. (2025). 83 Persen Daerah Masih Bergantung TKD, Efektivitas Belanja Diuji. *Tribunnews*, 14 Juli 2025. <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/07/14/83-persen-daerah-masih-bergantung-tkd-efektivitas-belanja-diuji>
- Ghozali, I. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan EViews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halimah, U. N., Wullandari, M., Rivaldo, A. D., & Noviarita4, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Analisis Multidisiplin*, 1(4), 7–16. <https://jossama.com/index.php/journal/article/view/32>
- Indrasari, Y. (2020). Efisiensi saluran distribusi pemasaran kopi rakyat di desa Gending Waluh Kecamatansempol (IJEN) Bondowoso. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 14(1), 44–50. <https://repository.unmuhjember.ac.id>
- Iqbal, M., Ginting, F., Wijaya, A., Awaluddin, M. (2023). Analisis *Flypaper effect* pada Belanja Daerah. *Jurnal Kinerja*, 20(3), 430–437. <https://doi.org/10.30872/jkin.v20i3.13927>
- Mukhtar, S. E. (2022). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Penerbit Deepublish.
- Nasir, A. R. (2023). *Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia: Membangun Kemandirian Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah*. CV Dotplus

- Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=Herneaaaqbaj>
- Pramono, D. J. (2021). *Otomatisasi Tata Kelola Keuangan SMK/MAK Kelas XI*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=Ljiqeaaaqbaj>
- Sagoe, C. D., & Tingum, E. N. (2021). *Flypaper effect* of Intergovernmental Transfers and Incentives to Improve Own-Source Revenue Mobilization of Local Governments in the Central Region of Ghana. *Open Journal of Social Sciences*, 9(8), 434–447. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.98030>
- Solicha, F. A., & Hanifa, N. (2024). Analisis *Flypaper effect* pada Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah di Nusa Tenggara Timur. *Independent: Journal of Economics*, 4(3), 126–137. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.66059>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 160.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Utami, S., & Iskandar, D. D. (2020). *Flypaper effect* terhadap Determinan Belanja Daerah dan PAD pada 34 Provinsi di Indonesia 2013-2018. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(3), 44–59.
- Yulianti, & Daud. (2021). Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kajian Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Mujaddid Humaniora*, 7(2), 119–124. <https://doi.org/10.58553/jalhu.v9i2>